



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAKSANA PUAP
TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK DITINJAU DARI SISI
PEMERINTAH DAN PETANI PELAKSANA”**

**BIDANG KEGIATAN:
PKM-GT**

Diusulkan Oleh :

Ade Nurmarita Sari H34061581(2006)

Elva H34060750(2006)

Najmi Anniro H34051840 (2005)

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009

HALAMAN PENGESAHAN USUL

Judul Kegiatan : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaksana PUAP Tidak Berjalan Dengan Baik Ditinjau Dari Sisi Pemerintah Dan Petani Pelaksana

Bidang Kegiatan : () PKM-AI (X) PKM-GT

1. Ketua Pelaksana

a. Nama Lengkap : Ade Nurmarita Sari

b. NRP : H34061581

c. Departemen : Agribisnis

d. Institut : Institut Pertanian Bogor

e. Alamat Rumah dan No Tel./Hp : Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur (08561497904)

f. Alamat Email : Adenurmaritasari@yahoo.co.id

2. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 orang

3. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap : Rahmat Yanuar, SP, MSi

b. NIP : 132 321 442

c. Alamat Rumah dan No Tel./Hp : Jalan kapten yusuf Taman Sari Kab Bogor (0812 820 7185)

Bogor, 6 April 2009

Menyetujui,

Ketua Departemen

Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 131 415 082

Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan

Ade Nurmarita Sari

NRP. H34061581

Dosen Pendamping

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS

NIP. 131 473 999

Rahmat Yanuar, SP, MSi

NIP.132 321 442

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Gagasan Tertulis yang akan diajukan kepada lembaga DIKTI.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmat Yanuar, SP, MSi yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk membimbing kami dalam penyusunan gagasan tertulis ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan gagasan tertulis ini.

Gagasan tertulis ini membahas analisis faktor-faktor penyebab pelaksana puap tidak berjalan dengan baik ditinjau dari sisi pemerintah dan petani pelaksana. Semoga gagasan tertulis ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Kami mengharapkan adanya kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki gagasan tertulis yang kami buat.

Bogor, 6 April 2009

Penyusun PKM

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan	vii
A. Pendahuluan	1
B. Telaah Pustaka	3
C. Metode Penelitian	4
D. Pembahasan (Analisis dan Sintesis)	5
E. Penutup	15
Daftar Pustaka	16
Daftar Riwayat Hidup	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Potensi Kecamatan Dramaga Tahun 2003	10
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Operasional Gagasan Tertulis	3
Gambar 2 Prosentase KK miskin tiap propinsi di Indonesia	5

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki populasi penduduk yang cukup besar yaitu, 228,5 juta jiwa, namun sebesar 37,2 juta jiwa tergolong ke dalam masyarakat miskin. Sekitar 63,4% dari jumlah masyarakat miskin tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama disektor pertanian (sensus BPS 2007). Pemerintah berusaha menetapkan sebuah kebijakan baru untuk mengurangi kemiskinan lewat bantuan modal kepada gapoktan yang terdapat di desa miskin atau tertinggal. Kebijakan ini dikenal sebagai Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Anggaran PUAP untuk tahun 2008 mencapai Rp 1,1 triliun, masing-masing desa yang terpilih akan mendapatkan dana PUAP sebesar Rp 100 juta.

Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan pada program PUAP. Sebagai mahasiswa sekaligus *agent of change* kami ingin mengkritisi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi program ini, serta berusaha untuk memeberikan solusi terbaik agar nantinya program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Permasalahan yang dikaji oleh penulis antara lain faktor –faktor penyebab pelaksanaan PUAP kurang berjalan dengan baik dari sisi pemerintah dan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kunjungan lapang ke Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Bogor Barat, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari media elektronik yang selanjutnya dianalisis.

Pelaksanaan PUAP saat yang tidak berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektivan tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pemerintah sebagai penancang program dan masyarakat sebagai objek dari pogram tersebut. Dari sisi pemerintah permasalahan yang terjadi antara lain sosialisasi tidak efektif, kurangnya koordinasi diantara pihak yang terlibat, program masih bersifat top down, lemahnya pengawasan serta ketidakterediaan aturan atau sanksi tegas yang menjamin dana puap diberdayakan secara optimal. Sedangkan, dari sisi petani pelaksana permasalahan yang terjadi antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan program PUAP, maka kami memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut, agar program ini dapat berjalan lebih baik kedepannya. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain : **Mengefektifkan Proses Sosialisasi, Melakukan Koordinasi dengan Baik, Melakukan Kombinasi Pendekatan Pelaksanaan PUAP, Pengawasan Langsung, Adanya Aturan atau Sanksi Tegas untuk Menjamin Pemberdayaan Dana PUAP secara Optimal serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia.**

Setelah melakukan analisis, saran yang dapat kami berikan antara lain: (1) perlu adanya tinjau ulang dan evaluasi terhadap ketidakefektivan koordinasi antara pihak yang terlibat; (2) Penyuluhan dilakukan secara intensif dengan menggunakan metode informal yang dapat menarik perhatian audien, yaitu masyarakat petani; (3) Pengawasan secara ketat.

Proses perancangan usaha kelompok harus dilakukan terlebih dahulu sebelum rancangan usaha bersama. Sehingga ide atau kehendak setiap anggota dapat tersalurkan. Untuk pengawasan hendaknya di buat sebuah lembaga independen yang berfungsi dalam peninjau dan pengawasan secara utuh terhadap pelaksanaan program. Pembentukan lembaga ini harus di persiapkan secara detail, dari program kerja, pelatihan, struktur organisasi, hingga sistem penggajian.

Sistem pemasaran unit usaha pun perlu diperhatikan, karena jika sistem ini tidak ada, para petani tidak akan dapat memasarkan hasil-hasil usahanya, dan selanjutnya akan berakibat pada minimnya pendapatan yang diterima oleh petani.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki populasi penduduk yang cukup besar yaitu, 228,5 juta jiwa, namun sebesar 37,2 juta jiwa tergolong ke dalam masyarakat miskin. Sekitar 63,4% dari jumlah masyarakat miskin tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama disektor pertanian (sensus BPS 2007).

Kemiskinan tersebut disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, diantaranya :(1) Sulitnya aksesibilitas terhadap modal; (2) Jumlah lahan petani yang terbatas; serta (3) Pendidikan petani yang rendah. (Deptan, 2006). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah sejak sebelum reformasi. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, banyak tujuan program yang tidak tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berusaha menetapkan sebuah kebijakan baru untuk mengurangi kemiskinan lewat bantuan modal kepada gapoktan yang terdapat di desa miskin atau tertinggal. Kebijakan ini dikenal sebagai Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Anggaran PUAP untuk tahun 2008 mencapai Rp 1,1 triliun, masing-masing desa yang terpilih akan mendapatkan dana PUAP sebesar Rp 100 juta.

Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan pada program PUAP, seperti singkatnya waktu sosialisasi dan tidak transparannya pelaksanaan program sehingga memberikan kesan bahwa PUAP hanya sekedar bagi-bagi uang untuk kepentingan politik jangka pendek.

Haruskah dana sebesar itu terbuang sia-sia tanpa ada *output* positif yang diperoleh?. Sebagai mahasiswa sekaligus *agent of change* kami ingin mengkritisi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi program ini, serta berusaha untuk memeberikan solusi terbaik agar nantinya program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi topik pembahasan gagasan tertulis ini adalah “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan Program PUAP Tidak Berjalan Dengan Baik Ditinjau Dari Sisi Pemerintah Dan Petani Pelaksana”

Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis mengkaji mengenai :

1. Apa sajakah faktor –faktor penyebab pelaksanaan PUAP kurang berjalan dengan baik dari sisi pemerintah?
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab pelaksanaan PUAP kurang berjalan dengan baik dari sisi masyarakat?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penulisan program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaksanaan PUAP kurang berjalan dengan baik dari sisi pemerintah.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaksanaan PUAP kurang berjalan dengan baik dari sisi masyarakat.

1.4 Manfaat Bagi Penulis, Pemerintah, dan Masyarakat

Gagasan tertulis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai alat pengasah kemampuan menulis sebuah gagasan serta mengkritisi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan berusaha menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

2. Bagi Pemerintah

Mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang menyebabkan pemerintah dalam pelaksanaan program PUAP kurang berjalan dengan baik.

3. Bagi Masyarakat

Membuka wawasan masyarakat mengenai program PUAP yang dilaksanakan pemerintah.

II TELAAH PUSTAKA

2.1 Definisi desa miskin

Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.

2.2 Definisi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

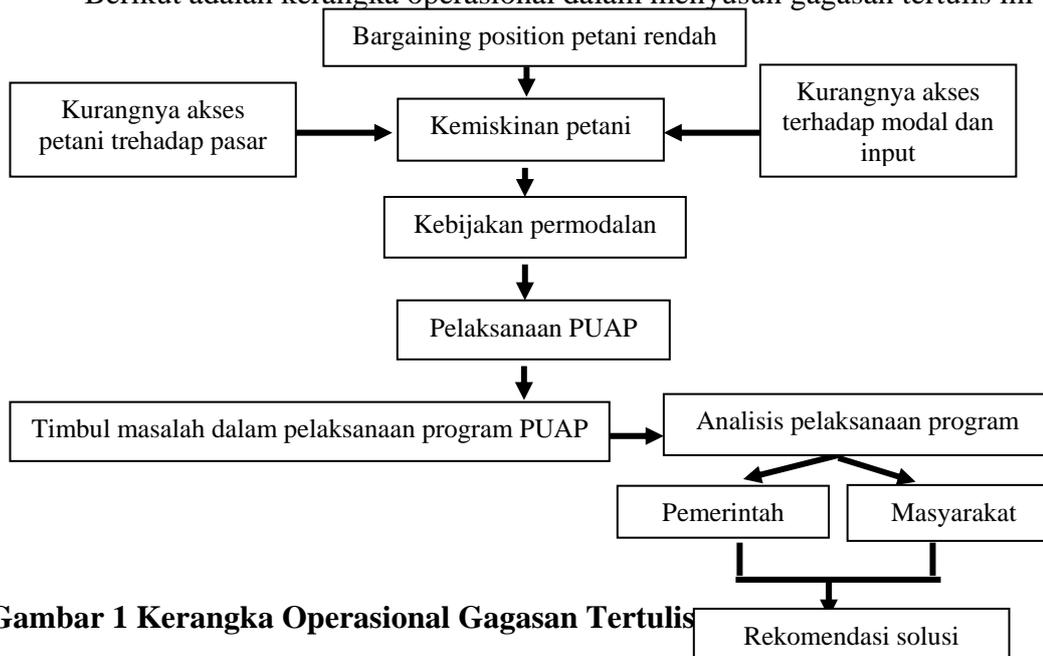
Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. (sahyuti, 2008).

2.4 Definisi PUAP

Pengembangan Usaha Agribisnis di Pedesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-M melalui batuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran. Pedoman Umum PUAP di atur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No: 16/Permetan/OT.140/2/2008, Tanggal: 11 Pebruari 2008.

2.5 Kerangka Operasional Gagasan Tertulis

Berikut adalah kerangka operasional dalam menyusun gagasan tertulis ini :



Gambar 1 Kerangka Operasional Gagasan Tertulis

III METODE PENULISAN

3.1 Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kunjungan langsung ke Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Bogor Barat. Dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari media elektronik.

3.2 Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Data berupa informasi-informasi yang telah terkumpul dikaitkan dengan fakta-fakta dan teori-teori yang ada dan selanjutnya dianalisis serta disintesis.

IV PEMBAHASAN

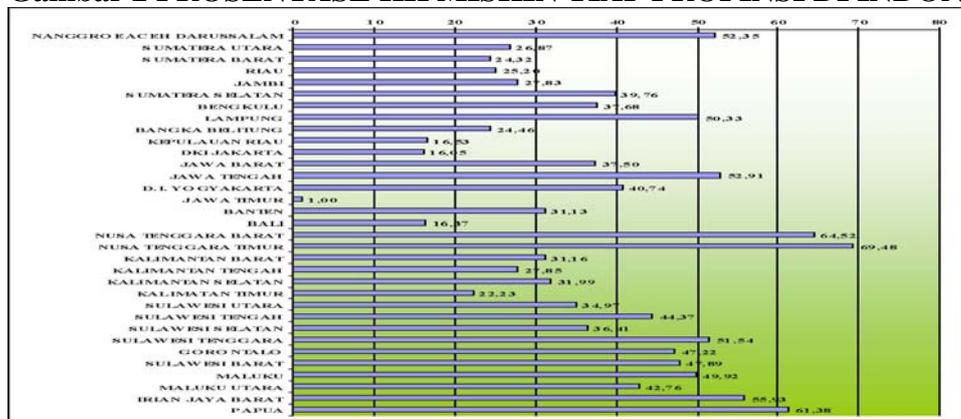
4.1 Analisis Masalah

Berbagai permasalahan terjadi di sektor agribisnis khususnya pertanian. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kemiskinan serta rendahnya kesejahteraan petani di Indonesia. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. (Pedoman Umum PUAP, 11 Februari 2008)

Salah satu program jangka menengah tersebut adalah pencaangan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan pada tahun 2008. PUAP merupakan bentuk fasilitasi modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PSDMP), Departemen Pertanian, DR. Ato Suprpto, yang juga ketua pelaksana tim PUAP mengatakan, lokasi PUAP terfokus di 10.000 desa miskin atau tertinggal yang memiliki potensi pertanian dan sumber daya manusia yang mampu mengelola kegiatan PUAP. Desa miskin yang terdapat di Indonesia tersebar di seluruh wilayah propinsi. Hal ini dapat terlihat pada diagram berikut.

Gambar 2 PROSENTASE KK MISKIN TIAP PROPINSI DI INDONESIA



Adapun dana PUAP yang telah cair hingga akhir Februari 2009 lalu kepada beberapa Gapoktan itu yakni di bidang Ketahanan Pangan sebesar Rp

123,5 Juta, Holtikultura Rp 63 Juta, kemudian di bidang Peternakan Rp 525 Juta, Perkebunan Rp 474.230 Ribu, Industri Rumah tangga Pertanian sebesar Rp 11 Juta dan Bakulan Rp 106 Juta serta usaha lain yang berbasis Pertanian Rp 71 Juta. Jika di kalkulasikan, jumlah dana PUAP yang telah dicairkan kepada 23 Gapoktan tersebut berjumlah Rp 1.373.730.000. (Solhanudin Rey, Kepala Badan Penyuluh Ketahanan Pangan dan Pertanian (Bapeltan) Kabupaten Batanghar)

Berdasarkan pantauan dari penulis baik langsung di lapangan maupun melalui berbagai media, masih banyak permasalahan yang terjadi pada program ini, sebagai contoh di Desa Purwasari Kecamatan Dramaga, Bogor. Salah satu petani responden mengatakan bahwa pada pelaksanaannya dana PUAP hanya dinikmati segelintir kalangan pengurus, sehingga menimbulkan keengganan para petani sekitar untuk tetap bergabung dalam Gapoktan. Kasus lain adalah penyelewengan dana oleh penyuluh di Kabupaten Fakfak dan kasus-kasus di daerah lainnya. Berdasarkan studi kasus tersebut dan dikaitkan dengan indikator Keberhasilan pada Pedoman Umum Puap, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PUAP belum berjalan secara efektif dalam mencapai tujuannya. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor penyebab pelaksanaan PUAP yang tidak berjalan dengan baik. Analisis Faktor-faktor tersebut dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pemerintah sebagai penancang program dan masyarakat sebagai objek dari pogram tersebut.

4.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan PUAP Tidak Berjalan dengan Baik Ditinjau dari Sisi Pemerintah

4.1.1.1 Sosialisasi Tidak Efektif

Sosialisasi merupakan salah satu proses penting untuk penyampaian atau pemberian informasi PUAP kepada masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi masyarakat akan mengetahui serta memahami dengan baik maksud dan tujuan dari program tersebut. Sosialisasi Program PUAP diperlukan dalam beberapa tahapan, baik dari tahap awal sebelum penentuan desa atau gapoktan penerima dana PUAP sampai ke tahap pelaksanaan program PUAP. Namun untuk tahap awal, **waktu yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi ini relatif singkat, yakni hanya 1 bulan dari 10 April hingga 12 Mei 2008.**

Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, pemerintah melalui dekatan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seperti daerah-daerah yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau. Sehingga, berdasarkan pantauan kompas pada tahun 2008, **banyak warga desa yang tidak mengetahui program ini**. Ada yang mendengar, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan ke mana mencari informasi, dan ada juga yang baru mendengar setelah proses seleksi ditutup pada 30 Mei 2008.

Selain itu sosialisasi yang dilakukan aparat tidak menghasilkan pemahaman yang baik bagi petani mengenai program PUAP, Salah satu contohnya adalah di desa Purwasari, kecamatan dramaga, Bogor. Berdasarkan kunjungan lapang yang dilakukan oleh penulis, salah satu petani yang menjadi koresponden mempunyai pemikiran bahwa PUAP tersebut merupakan dana yang tidak bergulir, sehingga dana tersebut tidak harus dikembalikan kepada Gapoktan. Pemahaman yang keliru tersebut di takutkan akan memberikan suatu peluang kegagalan program PUAP seperti program-program pemerintah sebelumnya yang sejenis.

4.1.1.2 Kurangnya Koordinasi diantara Pihak yang Terlibat

Minimnya Koordinasi dapat terlihat dari beberapa kasus misalnya dalam penentuan desa penerima PUAP. Permasalahan timbul ketika kesepakatan antara Komisi IV DPR RI dengan menteri pertanian dilanggar. Berdasarkan kesepakatan dari 10000 desa yang ditetapkan sebagai desa penerima dana PUAP 50 % nya berasal dari desa yang diajukan oleh komisi IV DPR RI. Namun, dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh tim penyusun program dengan tidak mengindahkan usulan setiap anggota DPR dalam mengajukan desa-desa calon penerima program dimana setiap anggota menyerap aspirasi dari daerah dan disepakati setiap anggota mengajukan 100 desa penerima program PUAP. *Miss* koordinasi ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan PUAP dan masyarakat petani di tingkat desa merasakan program ini sebagai program yang instan.

Contoh lainnya adalah di Kalimantan selatan, berbagai kendala dalam pelaksanaan Program PUAP di Kalsel umumnya karena belum selarasnya

pemahaman aparat pelaksana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Upaya pemecahan masalah juga terhambat oleh sulitnya koordinasi baik ke pusat, di provinsi maupun ke kabupaten. (BPPT Kalimantan selatan, 2008)

4.1.1.3 Program Masih Bersifat Top Down

Pelaksanaan program masih terkesan bersifat *top down*, hal ini bisa di lihat dari mekanisme pelaksanaan PUAP, **Hal tersebut dapat dikaji dari proses perekrutan desa penerima PUAP yang di tentukan langsung dari pusat**, walaupun dalam prosesnya data tersebut dikirim ke Provinsi sebagai bahan pertimbangan provinsi untuk mengajukan desa penerima PUAP. **Proses pemilihan desa ini mengakibatkan aspirasi dari semua desa yang notabene memenuhi kriteria desa miskin dan tertinggal tidak tersalurkan**. Artinya PUAP hanya dapat diakses oleh sebagian desa saja dan program ini tidak bisa dikatakan sebagai program yang secara komprehensif mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Selain itu kesan PUAP sebagai program top down dapat dilihat dari proses penentuan RUB dahulu baru kemudian RUK. Jadi, pada pelaksanaannya penentuan RUK menyesuaikan pada RUB, hal ini akan membatasi ruang berpikir petani anggota di masing-masing poktan dan belum tentu semua anggota poktan memiliki kemampuan yang sama untuk menjalankan rencana usaha kelompok tersebut . Hal ini akan berimbas pada kesiapan pelaksanaan rencana kelompok yang telah di buat.

4.1.1.4 Lemahnya Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengendalian dan evaluasi. Berdasarkan Pedoman Umum PUAP pengendalian dilakukan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan dari pusat ke provinsi, kemudian provinsi ke kabupaten, dan seterusnya. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pelaporan dari penyuluh ke PMT dan PMT ke kabupaten dan provinsi serta PMT ke pusat melalui E-Form.

Model pengawasan secara konsep cukup baik, namun dilapangan penulis menemukan bahwa **pengawasan dilakukan hanya oleh penyuluh sedangkan tim PUAP lainnya hanya mengandalkan laporan dari penyuluh**.

Pengawasan yang lemah akan **memberikan peluang terjadinya penyimpangan berupa kongkalikong antara penyuluh dan gapoktan ataupun penyuluh dengan PMT**. Seperti halnya **kasus gapoktan fiktif**, ada pihak yang mendirikan gapoktan lalu mengajukan rancangan usaha bersama, semata-mata bertujuan untuk mendapatkan dana PUAP sebesar 100 juta dan ketika dana tersebut telah didapatkan, maka gapoktan tersebut tidak kembali aktif, hanya berupa gapoktan fiktif tanpa aktivitas nyata untuk mengurangi kemiskinan serta mengembangkan sektor agribisnis.

Kasus adanya gapoktan yang diduga fiktif telah terjadi **di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur serta Minsel dan Kejari Amurang**. Pada desa-desa tersebut, dana yang diterima tidak digunakan untuk menjalankan usaha agribisnis, gapoktan tersebut pun tidak menjalankan aktivitasnya. Hal ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat desa di mana gapoktan tersebut berada. Karena, dana yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tidak dapat mereka gunakan.

Kasus lain adalah di Desa Purwasari, Kabupaten Dramaga, di desa tersebut penyaluran dana PUAP tidak merata dan hanya dikuasai oleh sebagian kalangan. Anggota dari kelompok tani sebagian besar adalah keluarga dan dilihat dari tingkat ekonomi merupakan golongan menengah atas. Sedangkan petani miskin yang berada di daerah tersebut tidak tersentuh program PUAP. Jadi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.

Adanya kasus-kasus tersebut akan menyebabkan **kerugian yang cukup besar bagi pemerintah**. Karena, bukan saja pemerintah telah **kehilangan dana yang seharusnya disalurkan**, pemerintah pun akan **gagal dalam menjalankan tujuannya** untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1.5 Ketidakterediaan Aturan atau Sanksi Tegas yang Menjamin Dana PUAP Diberdayakan Secara Optimal

Ketiadaan sanksi atau aturan yang dapat menjamin dana PUAP diberdayakan secara optimal, akan memberikan peluang baik bagi gapoktan sebagai suatu lembaga, pengurus gapoktan, dan anggota gapoktan untuk **tidak**

menjalankan apa yang telah disepakati bersama dalam RUB. Hal ini akan berakibat buruk pada kelangsungan perputaran modal yang akan terhenti dan pendayagunaan modal tidak terlaksana. Dan pada akhirnya akan sama seperti proram-program sebelumnya. **Tidak adanya sanksi atau aturan yang mengikat tersebut mejadi kendala yang cukup singnifikan bagi gapoktan,** misalnya pada **Gapoktan Mekar Sari (Desa Purwasari),** Bapak Suhandu selaku ketua Gapoktan mengungkapkan bahwa kasus ketersendatan pengembalian dan tidak adanya sanksi **membuat sebuah dilema bagi Gapoktan Mekar Sari** untuk menindaklanjuti ketersendatan tersebut. Apakah akan ditindaklanjuti dengan **mempertimbangkan sisi sosial atau malah menggunakan sisi ekonomi.**

4.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan PUAP Tidak Berjalan dengan Baik Ditinjau dari Sisi Petani Pelaksana

4.1.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis, kualitas sumber daya petani penerima PUAP dapat dikatakan belum cukup baik, karena desa penerima PUAP merupakan desa miskin dan tertinggal maka hal tersebut merepresentasikan pendidikan dari petani penerima cukup minim. Salah satu contoh desa penerima PUAP ahun 2008 adalah Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Bogor Barat. Berikut tabel yang merepresentasikan rendahnya kualitas pendidikan desa tersebut

Tabel 1. Potensi Kecamatan Dramaga Tahun 2003

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pendapatan Perkapita (Rp/Bulan)	Penduduk Buta Huruf (Usia Sekolah)	Luas Wilayah (Ha)
1	Sukadamai	6.760	90.162,40	1.222	304,00
2	Ciherang	9.548	848.449,28	1.787	466,00
3	Sinarsari	6.840	60.500,00	1.430	172,00
4	Sukawening	6.737	212.251,55	1.349	287,00
5	Petir	9.537	314.348,17	1.350	450,00
6	Purwasari	6.032	170.570,69	1.572	286,00
7	Cikarawang	7.043	216.762,59	1.505	227,00
8	Babakan	7.988	81.447,37	805	334,00
9	Dramaga	9.059	95.2192,98	1.580	163,00
10	Neglasari	5.984	274.326,03	1.425	196,00

Sumber: Profil Desa Kecamatan Dramaga, 2004

Rendahnya pendidikan petani berimplikasi pada pemahaman yang rendah terhadap program PUAP. Sosialisasi yang kurang baik secara kuantitatif mupun kualitatif menambah ketidakpahaman petani pelaksana. Misalnya, di Desa Purwasari, beberapa petani mengungkapkan bahwa dana PUAP merupakan dana

yang murni bantuan sehingga tidak perlu dikembalikan. Pemahaman ini mengakibatkan perputaran dana menjadi tersendat dan akan berdampak pada kegagalan seperti program-program lainnya (Bimas, Inmas, KUT, dan lainnya).

4.2 Sintesis

Untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang ada berkaitan dengan program PUAP, maka kami memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut, agar program ini dapat berjalan lebih baik kedepannya. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain :

4.2 .1 Mengefektifkan Proses Sosialisasi

Sosialisasi merupakan aspek penting yang diharapkan mampu memperkenalkan secara terperinci mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan program PUAP. Sosialisasi dana PUAP tersebut diperlukan baik dari tahap awal sebelum penentuan Desa atau Gapoktan Penerima PUAP sampai ke tahap pelaksanaan program PUAP. Beberapa contoh aktivitas yang dapat dilakukan oleh tim sosialisasi pelaksana program PUAP antara lain :

- Sosialisasi dilakukan secara berulang dengan intensitas kunjungan yang lebih tinggi. Para tim sosialisasi, melakukan kunjungan langsung ke kelembagaan non-formal, seperti kelompok kesenian, kelompok arisan, kelompok tani, karang taruna, wanita tani, dan kelompok keagamaan (kelompok gereja, pengajian, dan remaja islam masjid) serta ke lembaga formal dengan memanfaatkan LSM agar sosialisasi tidak terhambat karena keterbatasan penyuluh. Konsepnya dapat dilakukan dengan mengadakan seni pertunjukan, paduan antara tradisional dan modern yang didalamnya, terdapat alur cerita yang mengisahkan keuntungan pembentukan gapoktan, kriteria desa dan gapoktan penerima PUAP, konsep dan tujuan PUAP, serta penekanan pada alur pelaksanaan program PUAP.
- Menggunakan media *audio Visual* yang dikemas dengan menggunakan Cerita Rakyat. Penggunaan tokoh dan tema dari cerita rakyat harus memperhatikan nilai-nilai yang memberikan unsur mengikat yang akan menimbulkan kesadaran yang kuat mengenai ketentuan dan tujuan dari program tersebut. Setelah proses sosialisasi dilakukan, para tim sosialisasi

harus menggali pengetahuan masyarakat petani mengenai informasi yang telah disampaikan dengan memberikan kesempatan tanya jawab serta pemberian *reward* bagi petani sebagai insentif.

Selain tata cara tersebut, para tim sosialisasi juga perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dalam penyampaian materi dan menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami serta tidak menggunakan istilah-istilah asing yang membingungkan masyarakat (d disesuaikan dengan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat setempat).

4.2.2 Melakukan Koordinasi dengan Baik

Koordinasi antar instansi yang dilibatkan dalam pelaksanaan program PUAP merupakan salah satu penentu keberhasilan program ini. Untuk itu diperlukan evaluasi, agar pihak-pihak tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peranannya masing-masing. Dalam hal ini Menteri Pertanian, sebagai koordinator diharapkan mampu mengkoordinasikan secara baik seluruh instansi yang terlibat, misalnya dengan menerapkan sistem komunikasi yang efektif antar instansi. Selain itu, dengan membuat semua pihak merasa bagian dari program ini, dapat dipastikan pihak-pihak tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, tanpa ada yang dipaksakan.

4.2.3 Melakukan Kombinasi Pendekatan Pelaksanaan PUAP

Pendekatan program PUAP hendaknya mengadopsi kombinasi dari dua pendekatan yaitu *top-down* (berakhir pada masyarakat sasaran petani) dan *bottom-up* (berawal dan berakhir pada masyarakat sasaran petani hutan). *Top-down planning* dilaksanakan oleh pembuat keputusan tanpa memahami kondisi penduduk di daerah perencanaan. Rencana ditentukan oleh pejabat lokal dengan arahan-arahan tertentu yang harus diimplementasikan. *Bottom-up planning* disusun dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses perencanaannya. Masyarakat dalam organisasi pertanian, diikutsertakan dalam penyusunan rencana.

Selain itu, prinsip-prinsip pada tahap yang lebih tinggi, tujuan dan implementasi program harus disatukan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

petani di tingkat lokal. Adapun keuntungan dari pelaksanaan program tersebut adalah program berjalan secara transparan sehingga timbulnya rasa percaya diantara pihak yang terlibat. Selain itu dari sisi masyarakat petani adalah timbulnya rasa memiliki terhadap program PUAP dan mereka memahami secara mendalam mengenai tujuan dari PUAP tersebut. Harapannya, dengan adanya sinergitas dan rasa percaya antar pihak yang terlibat membuat program PUAP bisa terealisasi secara efektif.

4.2.4 Pengawasan Langsung

Sejauh ini rencana pengawasan PUAP cenderung pada sistem pengawasan yang konvensional dan represif. Ternyata pengawasan dengan model tersebut memberikan peluang terhadap penyimpangan dana dan ketidakberlanjutan usaha. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu dicari cara pengawasan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan spirit desentralisasi. Pengawasan berkelanjutan menjadi penting karena program semacam PUAP bukanlah program temporer atau insidental.

Bentuk Pengawasan yang ditawarkan penulis adalah dengan mendirikan lembaga yang terpisah dari tim pengarah maupun pelaksana program. Lembaga tersebut diberi kewenangan khusus untuk memantau jalannya program tersebut dari Pusat hingga tingkat desa. Adapun anggota dari tim tersebut merupakan tokoh adat masyarakat setempat yang notabenehnya di segani oleh masyarakat petani di daerah tersebut. Untuk tim pengarah lembaga tersebut berasal dari badan, instansi atau lembaga yang tidak terlibat secara langsung terhadap program PUAP, misalnya KPK. Pengawasan ini hendaknya dilakukan secara intensif misalnya seminggu tiga kali. Tidak hanya memantau di gapoktan tetapi juga petani anggota yang terlibat. Selain itu Lembaga tersebut, baik secara independen maupun bekerjasama dengan tim pusat PUAP melakukan sidak langsung ke desa penerima PUAP. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan (*moral hazard*) dari anggota lembaga pengawas tersebut, maka pemerintah hendaknya memberikan gaji yang cukup besar dan keterjaminan dalam hal keamanan, sehingga orang dalam lembaga tersebut bisa bekerja tanpa intervensi dari pihak mana pun.

4.2.5 Adanya Aturan atau Sanksi Tegas untuk Menjamin Pemberdayaan Dana PUAP secara Optimal

Sanksi dan aturan yang jelas sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan program PUAP. Bagi tim PUAP pusat serta tim teknis pelaksana yang melakukan penyimpangan, sanksi dapat berupa peringatan, proses hukum, dan pemberhentian oleh pemerintah. Namun ketika penyimpangan yang terjadi tersebut dilakukan oleh pengurus dan anggota gapoktan, belum terdapat aturan yang jelas untuk menindaklanjuti penyimpangan tersebut, mengingat dana PUAP merupakan dana yang tidak digulirkan lagi ke pusat.

Menyikapi permasalahan tersebut, maka diperlukan sanksi atau aturan yang tegas untuk menjamin keberlanjutan program PUAP. Sanksi atau aturan untuk pengurus dan anggota tersebut hendaknya berasal dari kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kondisi para anggota gapoktan, dan norma yang ada di desa tersebut. Adapun rekomendasi sanksi dapat berupa embargo untuk dapat mengakses produk usaha dari gapoktan dalam waktu yang disepakati dan sanksi berupa penyiaran ke media massa mengenai penyimpangan yang dilakukan.

4.2.6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia diperlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak di luar pemerintah. Untuk jangka pendek dan menengah, peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan LSM dengan memberikan pendidikan secara informal melalui peran media audio visual. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyuluhan dengan metode yang tidak monoton. Untuk masalah pendanaan, LSM dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk membuka akses tersebut, misalnya melalui PBB, *World Bank*, lembaga sosial, dan lembaga ekonomi (sebagai contoh perusahaan).

Sosialisasi dari pemerintah maupun pihak luar jika dilakukan secara intensif juga merupakan bentuk dari pendidikan informal bagi petani. Oleh karena itu, proses sosialisasi ini harus mengandung pengetahuan serta informasi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia (petani), baik itu secara *soft skill* maupun *hard skill*.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PUAP yang dikaitkan dengan indikator keberhasilan, dapat disimpulkan bahwa program PUAP belum berjalan secara efektif. Ketidakefektivan ini berasal dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai pihak perencana dan pengawas, serta masyarakat sebagai sasaran program.

5.2 Saran

5.2.1 Jangka Pendek

Untuk menyukseskan Program PUAP 2008 yang telah berjalan, dapat melalui tahapan-tahapan berikut: (1) Melakukan tinjau ulang dan evaluasi terhadap ketidakefektivan koordinasi antara pihak yang terlibat; (2) Penyuluhan dilakukan secara intensif dengan menggunakan metode informal yang dapat menarik perhatian audien, yaitu masyarakat petani; (3) Pengawasan secara ketat, melalui tim-tim yang telah dibentuk oleh pemerintah, yaitu dari tim pusat sampai tim teknis tingkat kecamatan. Pengawasan ini diharapkan dilakukan secara mendadak dari tim pusat dan dilakukan secara intensif bagi tim teknis kecamatan. Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan kepada gapoktan sebagai suatu lembaga, tetapi juga anggota-anggota gapoktan secara subjektif dan masyarakat petani yang berada di daerah sekitar.

5.2.3 Jangka Panjang

Proses perancangan usaha kelompok harus dilakukan terlebih dahulu sebelum rancangan usaha bersama. Sehingga ide atau kehendak setiap anggota dapat tersalurkan. Untuk pengawasan hendaknya di buat sebuah lembaga independen yang berfungsi dalam peninjau dan pengawasan secara utuh terhadap pelaksanaan program. Pembentukan lembaga ini harus di persiapkan secara detail, dari program kerja, pelatihan, struktur organisasi, hingga sistem penggajian.

Sistem pemasaran unit usaha pun perlu diperhatikan, karena jika sistem ini tidak ada, para petani tidak akan dapat memasarkan hasil-hasil usahanya, dan selanjutnya akan berakibat pada minimnya pendapatan yang diterima oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2008. PUAP Dikhawatirkan Tak Tepat Sasaran. <http://www.kronline.com>. [20 Maret 2009]
- Anonim. 2008. Sosialisasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). <http://www.deptan.go.id> [20 Maret 2009]
- Anonim.2008. Wagub Buka Sosialisasi PUAP. <http://www.syamlan.com> [19 Maret 2009]
- Anonim.2009. Penerima PUAP Diduga Fiktif. <http://www.manadopost.com> [19 Maret 2009]
- Anonim. 2009. 10.000 Desa ditarget terima dana PUAP. <http://www.solopos.com> [19 Maret 2009]
- Anonim. 2009. Workshop Sosialisasi eform PUAP Bagi Calon Petugas PMT. <http://www.pnpm-mandiri.org/elibrary>. [20 Maret 2009]
- Anonim. 2009. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Bisa Menjadi Bagian dari PNPM Mandiri. <http://www.pnpm-mandiri.org/elibrary>. [20 Maret 2009]
- Anonim. 2009. Dana PUAP Terus Bergulir, 7 Gapoktan Tunggu Verifikasi. <http://202.152.33.84/new/>. [20 Maret 2009]
- Anonim.2009.PUAP Membantu Masalah Permodalan Petani. <http://bptp-jambi@litbang.deptan.go.id> [19 Maret 2009]
- Prabowo, Hermas.2008. Puap Jangan Sekedar Bagi-Bagi Uang. <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/PUAP%20Jangan%20Sekedar.pdf>. [20 Maret 2009]
- Wahyudi, Johan.2009. Dana PUAP Diduga Lenyap. <http://www.gavick.com> [19 Maret 2009]
- Anonim. 2007. Bantu Desa Miskin, Deptan Gulirkan Dana PUAP. <http://www.kapanlagi.com> [19 Maret 2009]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ketua Pelaksana

Nama : Ade Nurmarita Sari

NIM : H34061581

Fakultas/Dept/Semester : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis/6

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 4 maret 1989

Alamat Asal : Rt002/Rw001 No.08 Pinang Ranti
Kecamatan Makasar Jakarta Timur

Alamat Bogor : Pondok Malea, Babakan Raya Dramaga

No. Handphone : 0856 149 7904

Alamat E-Mail : adenurmaritasari@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. TK Harapan Sidoarjo
2. SDN Waru III Sidoarjo
3. SDN PTPN IV Medan
4. SDN Jatiwaringin Asri I Pondok Gede
5. SLTP Angkasa Jakarta Timur
6. SMUN 48 Jakarta Timur
7. Institut Pertanian Bogor

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PBB SDN Jatiwaringin Asri I 1999-2000
2. Anggota PBB SLTP Angkasa 2000-2001
3. Anggota Teater Empat Lapan 2003-2004
4. Anggota Onigiri Japan Club 2007-2008
5. Koordinator Divisi Humas danus Onigiri Japan Club 2008
6. Staf Dept Polkastrad BEM FEM IPB 2007-2008
7. Anggota FEM English Practice Community (FEP-C) 2008
8. Staf Divisi Creative and Carrier Development
Himpunan Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA) 2008-Sekarang

Prestasi :

1. Juara I Lomba Persatuan Baris - berbaris se-Kecamatan Pondok Gede Bekasi Tahun 1999
2. Juara II Lomba Persatuan Baris – berbaris dalam Rangka Ulang Tahun TMII Tahun 1999
3. Ketua Kelompok PKM-K yang didanai, dengan judul Proposal ”*cootaz* (*cookies* talas) khas bogor dari tepung talas bogor sebagai pengembangan produk turunan talas dan alternatif pangan sehat” Tahun 2008
4. Anggota Kelompok PKM-M yang didanai, dengan judul Proposal ”Pemanfaatan talas bogor sebagai bahan substitusi tepung terigu melalui program pelatihan pembuatan cookies dan produk bakery lainnya di Desa Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor” Tahun 2008

Nama Anggota

Nama : Najmi Anniro
 NIM : H34051840
 Fakultas/Dept/Semester : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis/8
 TTL : Jambi, 12 Desember 1986
 Alamat : Pesantren Mahasiswa Berprestasi PPSDMS
 NF Regional V Bogor, Cihideung Hilir,
 Cibanteng, Kabupaten Bogor
 No Handphone : 085266070266
 Alamat E-mail : najmi_anniroyahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Harapan II (T.A. 1992/1993 – 1993/1994)
2. SD At Taufiq Jambi (T.A. 1993/1994 – 1998/1999)
3. SLTP Negeri 1 Jambi (T.A. 1999/2000 – 2001/2002)

4. SMU Negeri 3 Jambi (T.A. 2002/2003 – 2004/2005)
5. Institut Pertanian Bogor (T.A. 2005/2006 – Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (2007-2008)
2. Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) (2008-2010)
3. Dewan Penasihat Himpunan Mahasiswa Jambi se-Bogor (2008-2009)
4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jambi se-Bogor (2006-2008)
5. Kepala Departemen Politik, Kajian Strategis, dan Advokasi BEM FEM IPB (2006-2007)
6. CEO Agribisnis 42 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB (2006-sekarang)
7. Divisi Syiar FORMASI (2006-2007)
8. Ketua Komisi PSDM Dewan Perwakilan Mahasiswa TPB IPB (2005-2006)
9. Wakil Ketua MPK SMU N 3 Kota Jambi (2004-2005)

Prestasi :

1. Juara I Bedah Buku Komunikasi SMU Negeri 3 Jambi 2003
2. Juara II Karya Ilmiah Tingkat Provinsi Jambi 2004
3. Duta Anak Jambi dalam Forum Remaja Hari Kesehatan Nasional 2004
4. Duta Anak Jambi dalam Forum Remaja Hari Anak Nasional 2004
5. Juara II Lomba Debat Politik TPB IPB 2006
6. Juara I Tenis Meja Tunggal Putra Sportakuler FEM IPB 2006
7. Juara I Tenis Meja Ganda Putra Sportakuler FEM IPB 2006
8. Peserta Terbaik LKMM DPW II Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) 2007
9. Juara III Tenis Meja Olimpiade Mahasiswa IPB 2007
10. Juara II Tenis Meja Sportakuler FEM IPB 2007
11. Juara I Catur Putra Sportakuler FEM IPB 2007

12. Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan 2008 didanai
DIKTI

13. Juara I Tenis Meja Sportakuler FEM IPB 2008

Nama : Elva
 NIM : H34060750
 Fakultas/Dept/Semester : Ekonomi dan Manajemen/Agribisnis/6
 Tempat, Tanggal Lahir : M Enim, 18 Februari 1989
 Alamat Asal : Jl. Kemayoran No 60 Muara Enim,
Sumatera Selatan
 Alamat Bogor : Pondok Madinah, Bara 5 Darmaga
 No. Handphone : 0856 9170 1539
 Alamat E-Mail : elva_bastian@yahoo.com
 Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi
2. SDN 18 Muara Enim
3. SLTPN 1 Muara Enim
4. SMAN 1 Muara Enim
5. Institut Pertanian Bogor

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota OMDA Palembang 2006-sekarang
2. Anggota BEM FEM 2007-2008
3. Penanggung Jawab FEM English Practise Community 2007-2008
4. Kepala Departemen Divisi Creativity and Career Development
Himpunan Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA) 2008-Sekarang

Prestasi :

1. Juara I Olimpiade Kimia Tingkat Kabupaten Muara Enim
2. Finalis Olimpiade Kimia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
3. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Hari Lingkungan yang
diadakan oleh PT PAMA

4. Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah "Peranan Teknologi Informasi dalam perkembangan suatu daerah" Tingkat Kabupaten Muara Enim
5. Finalis Honda Best Student Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
6. Juara III Lomba Mading Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
7. Juara I paduan suara Tingkat Kabupaten Muara Enim
8. Ketua Kelompok KPKM , dengan judul "Analisis keberadaan Impor Kedelai Terhadap Kesejahteraan petani" Tahun 2008
9. Anggota Kelompok PKM-M yang didanai, dengan judul Proposal "Pemanfaatan dan Pemasaran Jambu Biji Sebagai Makanan Alternatif Kesehatan yang menarik Melalui Program Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Manisan Jambu Biji di Desa Bojong Jengkol Ciampea, Kabupten Bogor " Tahun 2008